

## PELAKSANAAN KONSULTASI PUBLIK SEBAGAI UPAYA MEWUJUDKAN ASAS KETERBUKAAN DALAM PEMBANGUNAN BENDUNGAN

### PASELLORENG DI KABUPATEN WAJO

Muhammad Adhe Rizaldi\* dan Sulastriyono\*\*

#### INTISARI

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan konsultasi publik dalam pembangunan Bendungan Paselloreng di Kabupaten Wajo, dan hambatan penerapan asas keterbukaan pada pelaksanaan konsultasi publik pembangunan Bendungan Paselloreng.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian empiris yang bersifat deskriptif. Sumber data yang digunakan adalah data primer yang didapat dari penelitian lapangan dengan cara wawancara dan data sekunder yang didapat dari penelitian kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Semua data yang dikumpulkan kemudian disajikan secara deskriptif dan dianalisis secara kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan konsultasi publik telah memberikan informasi dasar kepada masyarakat terkait rencana pembangunan Bendungan Paselloreng, seperti tujuan proyek, lokasi terdampak, dan mekanisme pengadaan tanah. Terdapat hambatan dalam pelaksanaannya, seperti keterbatasan waktu, kurangnya penjelasan mengenai dampak negatif proyek, dan minimnya pemahaman masyarakat terhadap istilah teknis yang disampaikan. Selain itu, masyarakat mengungkapkan ketidakjelasan mengenai prosedur keberatan terhadap nilai ganti rugi, yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum. Pelaksanaan konsultasi publik dalam pembangunan Bendungan Paselloreng belum sepenuhnya mencerminkan asas keterbukaan secara substansial. Meskipun secara normatif telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 huruf e UU No. 2 Tahun 2012, namun dalam praktiknya masih terdapat hambatan yang mengurangi efektivitasnya.

**Kata Kunci:** Asas Keterbukaan, Bendungan Paselloreng, Konsultasi Publik, Pengadaan Tanah

---

\* Mahasiswa Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada

\*\* Dosen Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

**IMPLEMENTATION OF PUBLIC CONSULTATION AS AN EFFORT TO REALIZE  
THE PRINCIPLE OF TRANSPARENCY IN THE CONSTRUCTION OF THE  
PASELLORENG DAM IN WAJO REGENCY**

Muhammad Adhe Rizaldi\* and Sulastriyono\*\*

**ABSTRACT**

*This research aims to find out and analyse the implementation of public consultation in the construction of the Paselloreng Dam in Wajo Regency, and the obstacles to the application of the principle of openness in the implementation of public consultation in the construction of the Paselloreng Dam.*

*This research is a descriptive type of empirical research. The data sources used are primary data obtained from field research by means of interviews and secondary data obtained from library research consisting of primary legal materials and secondary legal materials. All data collected is then presented descriptively and analysed qualitatively.*

*Based on the research results, the implementation of public consultation has provided basic information to the community regarding the Paselloreng Dam development plan, such as project objectives, affected locations, and land acquisition mechanisms. There were obstacles in the implementation, such as time constraints, lack of explanation regarding the negative impacts of the project, and the lack of public understanding of the technical terms conveyed. In addition, the community expressed uncertainty about the procedure for objecting to the compensation value, which could potentially lead to legal uncertainty. The implementation of public consultation in the construction of Paselloreng Dam has not fully reflected the principle of openness substantially. Although normatively it has fulfilled the provisions in Article 2 letter e of Law No. 2 Year 2012, in practice there are still obstacles that reduce its effectiveness.*

**Keywords:** *Principle of Transparency, Paselloreng Dam, Public Consultation, Land Acquisition*

---

\* Student of Master of Notary, Faculty of Law, Universitas Gadjah Mada

\*\* Lecturer at Faculty of Law, Universitas Gadjah Mada